

Penyelenggara:



ISIF 2023

INDONESIA SOCIAL INVESTMENT FORUM

AKSELERASI PENCAPAIAN SDGs PASCA-COVID-19

Partner:



NUTRICIA



BREAKOUT 1 - BOUGAINVILLEA ROOM

PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI 2015-2022

Narasumber:

Setyo Budiantoro - Seknas SDGs

The Westin Resort Nusa Dua, Bali

13 Desember 2023

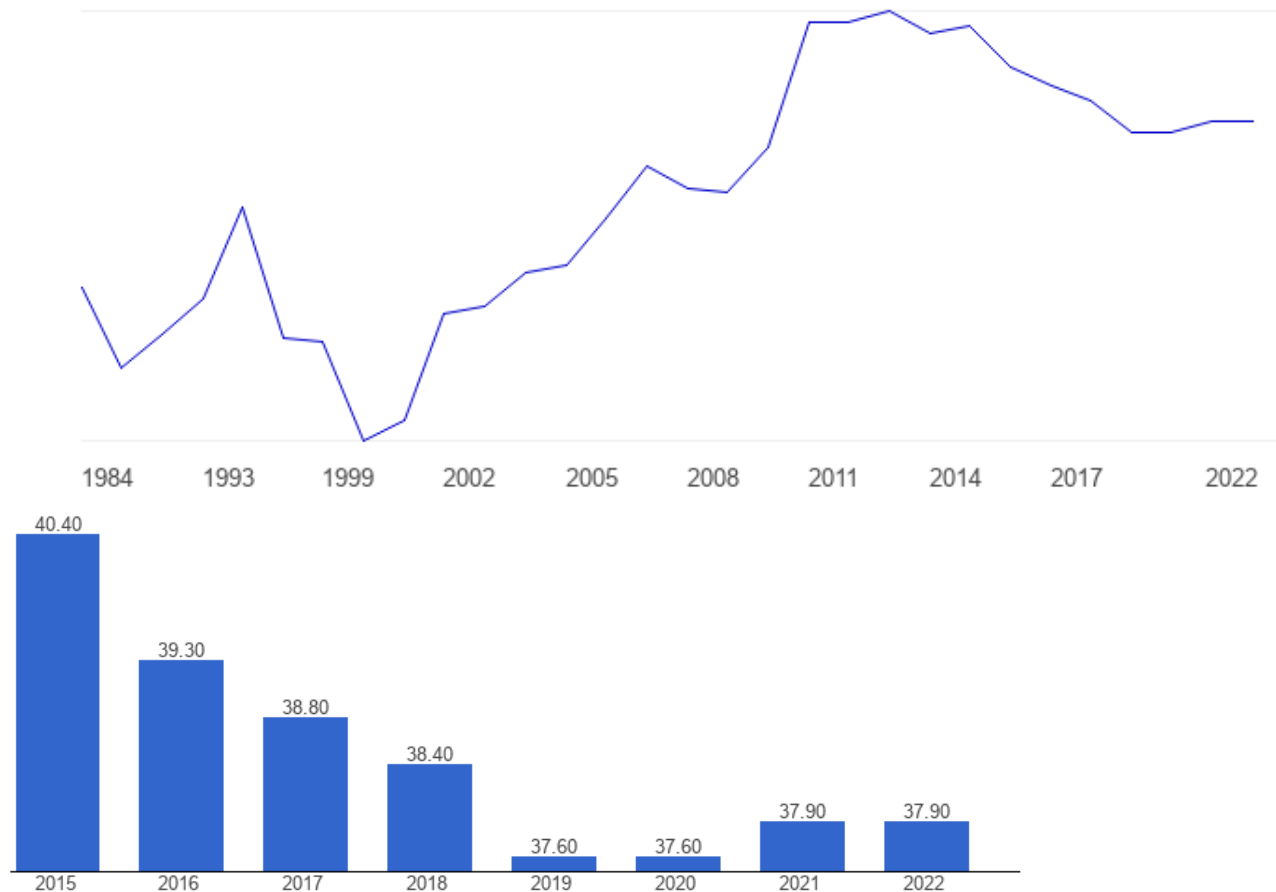
PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI 2015-2022 & STRATEGI PENCAPAIAN SDGs

Setyo Budiantoro

Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi
Sekretariat Nasional SDGs
Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan pada *Breakout Session I* ISIF 2023

Bali, 13 Desember 2023



https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/gini_inequality_index/

- Indonesia mengalami salah satu peningkatan ketimpangan tercepat di Asia Timur. Indeks Gini dari 30 pada tahun 2000 menjadi 41 pada tahun 2015 (Bank Dunia & BKF, 2020)
- Sejak tahun 2015, Indonesia mengalami penurunan ketimpangan dan sedikit terinterupsi karena dampak pandemi

Pertumbuhan Tanpa Pembangunan

Oleh SETYO BUDIANTORO

Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 5,78 persen pada 2013. Namun, ironisnya kemiskinan justru bertambah 0,48 juta orang.

Target penurunan kemiskinan menjadi 9,5-10,5 persen meleset jauh karena kemiskinan justru meningkat mendekati 11,5 persen dan intensitas kesengsaraan orang miskin makin hebat.

Pengangguran juga bertambah. Pengangguran terbuka bertambah 220.000 orang atau meningkat 6,25 persen. Berarti meleset dari target penurunan 5,8-6,1 persen pada 2013. Pengangguran terdidik bertambah, kecuali pada level SD ke bawah dan SMP. Ironis, makin terdidik justru menganggur.

Makin banyak ekspresi kekecewaan dan frustrasi karena pemerintah tak mampu menyejahterakan masyarakat. Menurut survei, ketidakpuasan publik terhadap pemerintah mendekati 85 persen (*Kompas*, 18/12/14). Mengapa pembangunan *pro-growth* tak mampu mewujudkan *propoor* dan *projob* seperti yang dijanjikan?

Pembangunan mundur

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini terendah dalam empat tahun terakhir. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah struktur ekonomi kita. Dalam 10 tahun terakhir, ekonomi Indonesia kembali mengandalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) mentah. Ini kemunduran besar karena seperti kembali ke tahap awal pembangunan.

Tahun 2004 kontribusi sektor penggalian dan pertambangan

tak sampai 9 persen dari produk domestik bruto (PDB), tetapi setelah itu meningkat hingga mendekati 12 persen.

Berbagai komoditas Indonesia hasil eksploitasi SDA membanjiri dunia tanpa nilai tambah berarti. Kita tidak mampu memanfaatkan rantai nilai komoditas global. Indonesia hanya menyuplai komoditas mentah atau semimemntah, nilai tambahnya dimanfaatkan oleh negara-negara lain.

Deindustrialisasi prematur

Kontribusi industri pengolahan Indonesia menurun drastis sejak 2004 dari lebih dari 28 persen terhadap PDB merosot menjadi kurang dari 24 persen pada 2013. Sektor industri pengolahan yang tidak berkembang membuat proses rantai nilai (*value chains*) dan nilai tambah (*value added*) lunglai. Kemampuan industri pengolahan menyerap tenaga kerja pun melambat.

Studi dari Harvard Kennedy School (2013) juga memperlihatkan ekspor industri manufaktur merosot dari 57,1 persen pada tahun 2000 menjadi 37,5 persen dari nilai total ekspor pada 2010. Maka, penyerapan tenaga kerja mengecewakan, terutama di sektor manufaktur. Pertumbuhan ekonomi naik, tetapi penyerapan tenaga kerja loyo.

Sebenarnya negara-negara maju, seperti Jerman, Amerika Serikat, Swedia, dan Inggris, juga mengalami deindustrialisasi. Namun, itu terjadi saat pendapatan per kapita telah mencapai 9.000 dollar-11.000 dollar AS per tahun. Sektor industri mulai mengalami kejenuhan sehingga menurun kontribusinya terhadap PDB, lalu sektor jasa meningkat.

Indonesia mengalami apa

yang disebut Rodrik (2014) deindustrialisasi prematur. Deindustrialisasi terjadi ketika pendapatan per kapita masih 3.000 dollar AS per tahun lalu bergeser ke pertumbuhan cepat di sektor jasa dan kembali mengandalkan eksploitasi SDA. Serapan tenaga kerja sektor jasa keuangan dan telekomunikasi jauh lebih kecil daripada industri pengolahan.

Pertanian terpuruk

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat *concern* dengan persoalan pembangunan dan menyampaikan pembangunan pertanian adalah kunci mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Akan tetapi, apa yang terjadi jauh dari realitasnya.

Selama 2005-2012, volume impor beras, jagung, kentang, dan kubis justru melonjak 10 kali lipat atau meningkat lebih dari 100 persen setiap tahun. Yang terburuk justru impor beras yang melonjak hampir 150 persen per tahun. Impor ubi kayu olahan meningkat 8 kali lipat dan pisang berlipat 5 kali pada kurun waktu yang sama. Bahkan, impor cabai segar berlipat hampir 7 kali selama empat tahun terakhir atau melonjak 160 persen per tahun.

Dengan banjir bandang impor produk pangan, jelas sektor pertanian Indonesia makin terpuruk. Belum lagi impor ternak atau daging. Seperti diketahui bersama, mayoritas kemiskinan terjadi di pedesaan dan mereka hidup dari pertanian. Realitas itu membuat orang miskin di desa makin miskin.

Kesenjangan melonjak

Sisi lain ekonomi Indonesia adalah orang kaya bertambah banyak dan makin kaya. Credit Su-

isse melaporkan, pertumbuhan jumlah orang kaya di Indonesia tercepat di dunia dengan peningkatan 5 kali lipat dalam satu dekade. Perkumpulan Prakarsa menghitung, pada 2008 akumulasi kekayaan 40 orang terkaya setara dengan kepemilikan 30 juta penduduk, lalu pada 2011 melonjak setara dengan kepemilikan 77 juta penduduk.

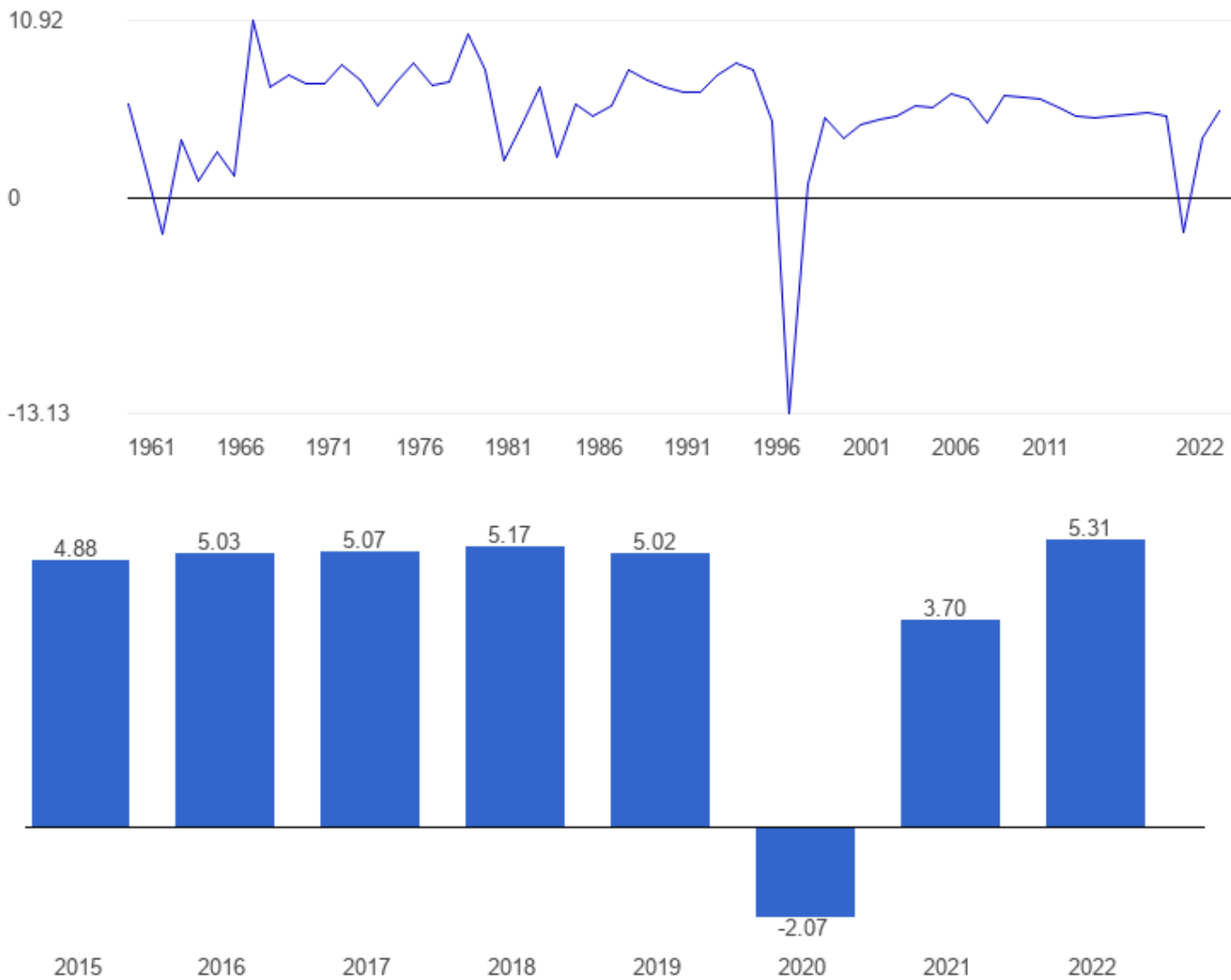
Perbankan adalah entitas mayoritas yang menguasai sektor keuangan. Jumlah total tabungan di perbankan kini mencapai lebih dari Rp 3.500 triliun. Namun, kurang dari 0,6 persen pemilik rekening menguasai lebih dari 70 persen tabungan atau sekitar Rp 2.500 triliun. Artinya ketimpangan sudah makin mengkhawatirkan. Indonesia mengalami kesenjangan terburuk sepanjang sejarah, tampak rasio gini yang sudah berada di 0,41.

Dudley Seers, seorang ekonom pembangunan terkenal dari Oxford, menulis *The Meaning of Development* pada 1970-an. Dia mengatakan, tolok ukur pembangunan ada tiga, yaitu apa yang terjadi dengan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Jika salah satu memburuk, sangatlah aneh disebut pembangunan meski pendapatan berlipat.

Sedihnya, di Indonesia ketiganya kini memburuk. Inilah yang disebut pertumbuhan tanpa pembangunan. Ekonomi tumbuh, tetapi kesejahteraan masyarakat justru terpuruk. Semoga pemerintahan baru nanti mengubah haluan pembangunan.

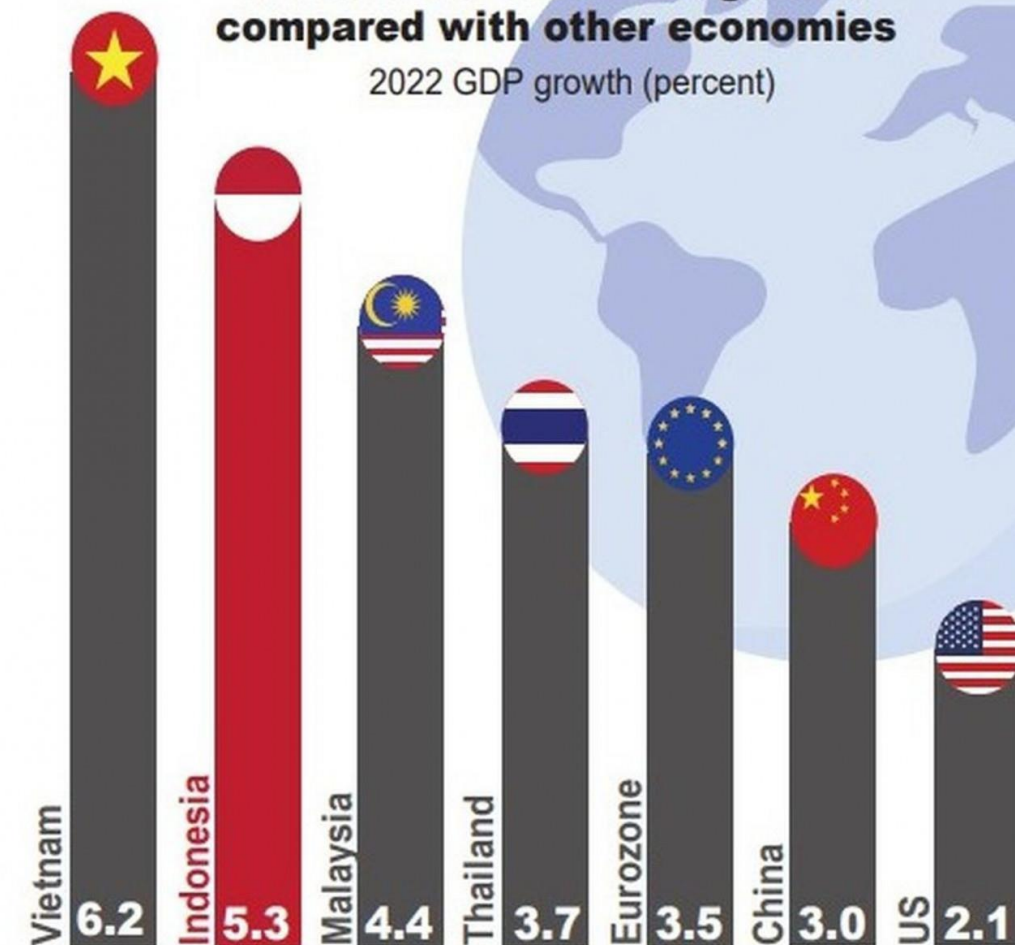
SETYO BUDIANTORO
Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa dan Pengajar Pascasarjana Kajian Kemiskinan Universitas Brawijaya Malang

DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA



Indonesia's economic growth compared with other economies

2022 GDP growth (percent)



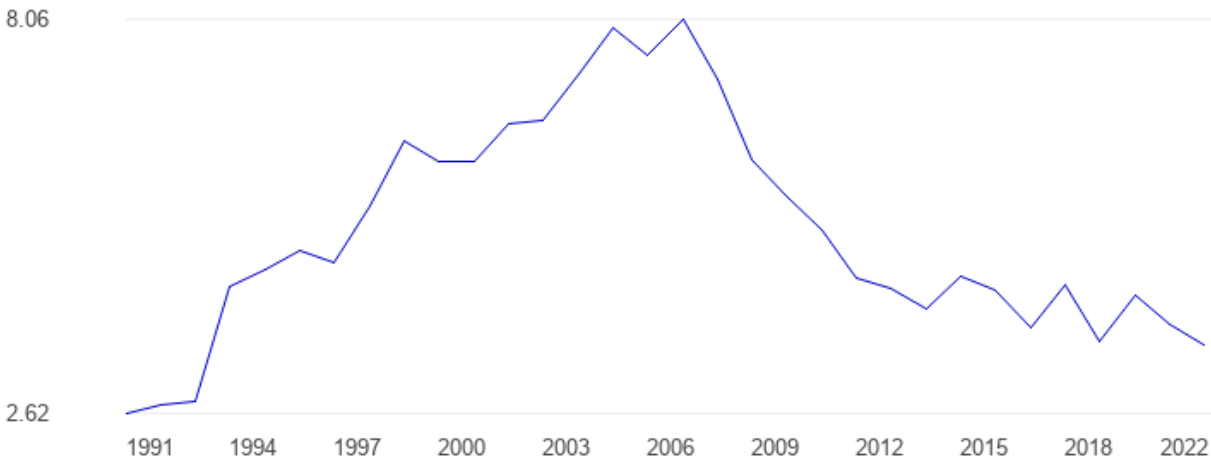
Source: Official statistics, IMF projections for Vietnam, Malaysia, Thailand

JP/Fadhil Haidar Sulaeman/Swi Handono

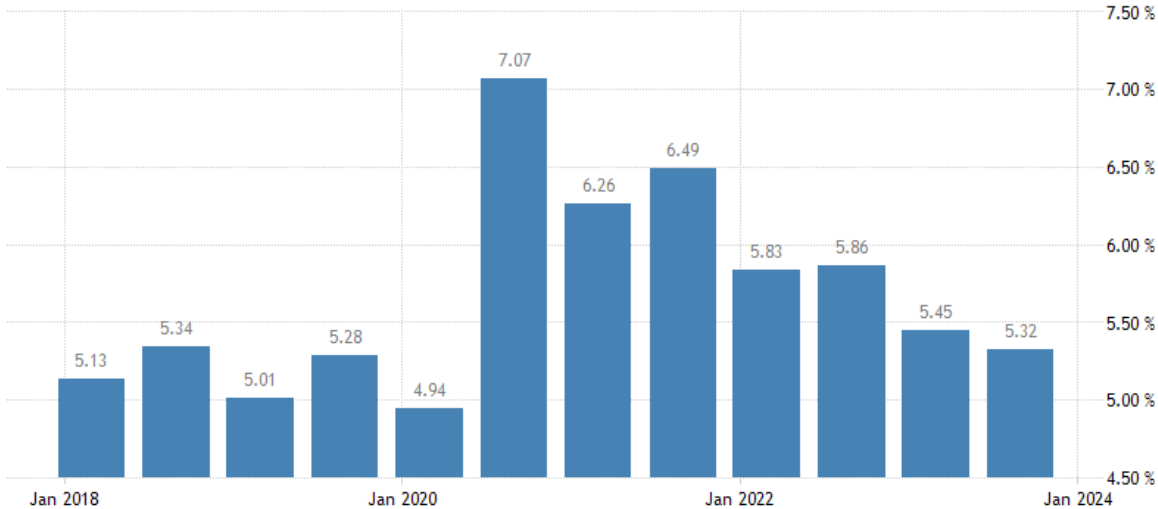
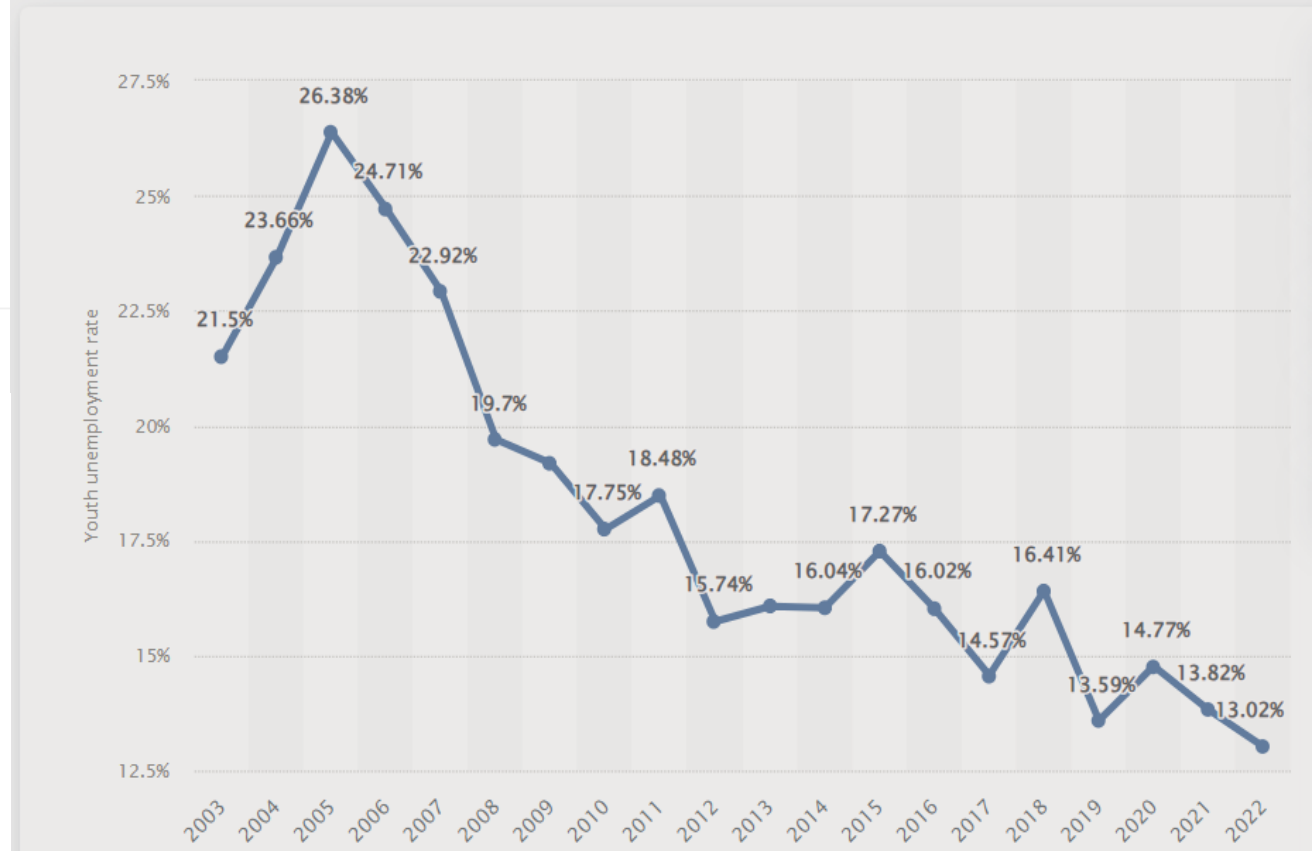
Sumber : Jakarta Post

Sumber : https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/economic_growth/

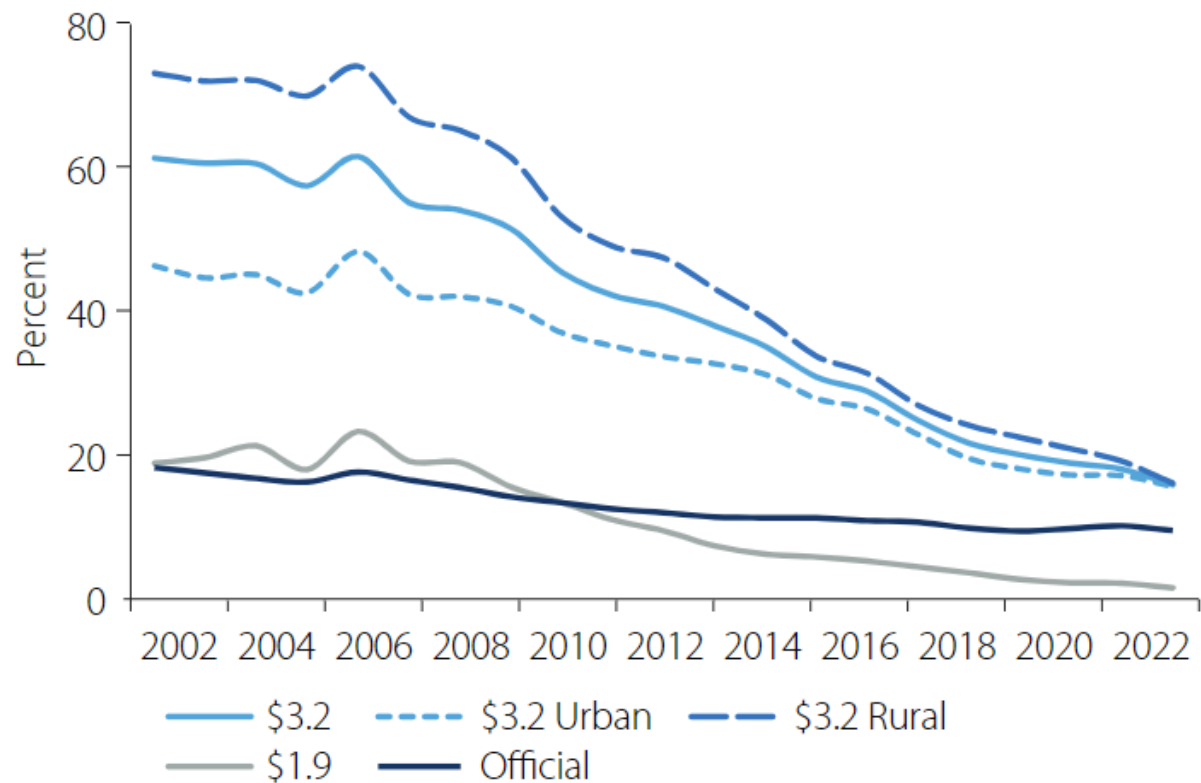
DINAMIKA PENGANGGURAN DAN PENGANGGURAN MUDA



Indonesia: Youth unemployment rate from 2003 to 2022



DINAMIKA KEMISKINAN DI INDONESIA



Indonesia: Poverty headcount ratio from 2012 to 2022



Sumber : Bank Dunia

PENTINGNYA KEMISKINAN MULTIDIMENSI

Rumah tangga yang lebih miskin



Sangat miskin Miskin Tidak aman secara ekonomi Aman secara ekonomi

Lebih besar dan harus mengurus lebih banyak anggota rumah tangga yang tergantung, kebanyakan anak-anak



Ukuran

6,0 5,3 4,1 3,2

Lebih lazim bekerja di bidang pertanian daripada di bidang jasa dan lebih lazim berusaha sendiri atau pekerja lepas



Anak-anak

0,38 0,34 0,24 0,19



Pendidikan

5,9 6,6 6,4 10,1



Pekerja lepas

14% 15% 14% 5%

Memiliki akses yang lebih sedikit terhadap listrik dan sanitasi yang layak, lebih jarang menggunakan gas untuk memasak, dan lebih sedikit akses internet



Listrik

92% 97% 98% 100%



Gas

51% 66% 74% 89%



Internet

10% 16% 25% 55%

Sumber : Bank Dunia

Dimensi dan Indikator	Cut-off
Kesehatan	
Nutrisi Balita	Individu dalam rumah tangga yang berumur 0-4 tahun dengan gizi seimbang yang dibawah rekomendasi pemerintah
Mordibitas	Individu dalam rumah tangga yang mengalami sakit selama sebulan terakhir dan mengganggu pekerjaan utamanya
Pendidikan	
Partisipasi Sekolah	Individu dalam rumah tangga berumur 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah atau tidak lagi melanjutkan sekolahnya sesuai pada umurnya dengan pendidikan yang dikenyam SMA
Lama Sekolah	Individu dalam rumah tangga berumur 19-30 tahun yang pendidikannya dibawah rekomendasi SMP
Perumahan	
Atap, Lantai, Dinding (Aladin)	Individu dalam rumah tangga yang salah satu dari atap, dinding atau lantai yang menggunakan bahan tidak layak
Kepadatan dalam hunian/ Overcrowdedness	Rumah tangga yang mempunyai luas lantai dibawah <7,2-meter persegi per orang
Kebutuhan Dasar	
Air Minum Layak	Individu dalam rumah tangga yang minum dari sumber air minum tidak layak
Bahan Bakar Memasak	Individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak
Sanitasi	Individu dalam rumah tangga yang menggunakan sanitasi yang kurang layak
Perlindungan Sosial dan Partisipasi	
Akta Kelahiran	Individu yang tidak mempunyai akta kelahiran
Internet	Jika semua orang dalam satu rumah tangga tidak menggunakan internet selama 3 bulan terakhir
Total	

Sumber : Perkumpulan Prakarsa



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Transformasi Ekonomi akan Membawa Indonesia Keluar dari *Middle Income Trap*

Proyeksi GNI per Capita Indonesia (USD)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Indonesia pada tahun

2045

... dengan pertumbuhan rata-rata 7%...

PDB Nominal: USD 9,8 T	PDB: 5 Besar Dunia	Rata-Rata Pertumbuhan Investasi: 6,8%
GNI per Kapita: USD 23.000 – 30.300	<i>Middle Income Class</i> : 80%	ICOR: 4,6 Pada tahun 2045
Industri Manufaktur: <ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi PDB : 28% - Kontribusi tenaga kerja : 25,2% 		

Productivity-Led Growth

Tahapan Transformasi Ekonomi

Tahap 1



2025 - 2029
Perkuatan Fondasi

Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

Kisaran Pertumbuhan: **5,6–6,1 persen**

Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB: **21,9%**

Middle Class Income: **38% Populasi**

Tahap 2



2030 - 2034
Akselerasi Transformasi

Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi

Kisaran Pertumbuhan: **6,9–7,8 persen**

Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB: **26,6%**

Middle Class Income: **50% Populasi**

Tahap 3



2035 – 2039
Ekspansi Global

Economic Power House yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh

Kisaran Pertumbuhan: **6,4–7,6 persen**

Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB: **30,0%**

Middle Class Income: **61% Populasi**

Tahap 4



2040 – 2045
Perwujudan Indonesia Emas

Negara Berpendapatan Tinggi

Kisaran Pertumbuhan: **5,4–6,7 persen**

Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB: **28,0%**

Middle Class Income: **80% Populasi**



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Pentahapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045

Pencapaian SDGs menjadi bagian krusial pentahapan pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Development Stages

2022 - Now



Posisi upper-middle
income country

2030



Menuntaskan target
SDGs pada tahun 2030

2041



Keluar dari middle
income trap

2045



Mencapai Visi
Indonesia Emas 2045



Visi Indonesia Emas 2045

Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan



Redesain Transformasi Ekonomi yang Lebih Inklusif, Berkeadilan, Dan Berkelanjutan

6 Game changers untuk Build Forward Better menuju Indonesia Maju



Strategi #1

SDM berdaya saing:

- Sistem Kesehatan
- Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)
- Riset dan Inovasi



Strategi #3

Ekonomi Hijau:

- Ekonomi rendah karbon dan ekonomi sirkuler
- *Blue Economy*
- Transisi energi



Strategi #5

Integrasi Ekonomi Domestik: (*economic powerhouse*)

- Infrastruktur konektivitas: Superhub, Hub Laut, Hub Udara
- *Domestic Value Chain*



Strategi #2

Produktivitas Sektor Ekonomi:

- Industrialisasi
- Produktivitas UMKM
- Modernisasi Pertanian



Strategi #4

Transformasi Digital:

- Infrastruktur Digital
- Pemanfaatan Digital
- Penguatan *Enabler*



Strategi #6

Pemindahan IKN:

- Sumber pertumbuhan baru
- Menyeimbangkan ekonomi antar wilayah



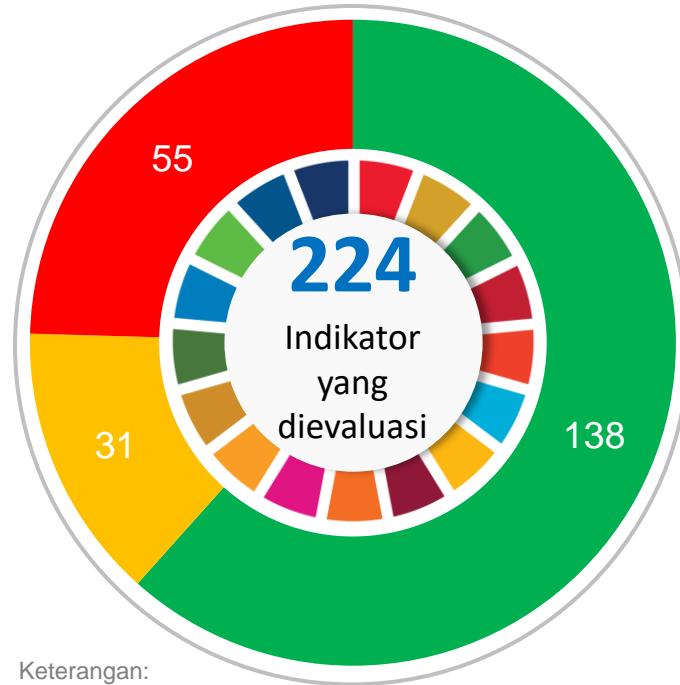


BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Status Capaian SDGs Tahun 2022

(dibandingkan dengan Target 2022)

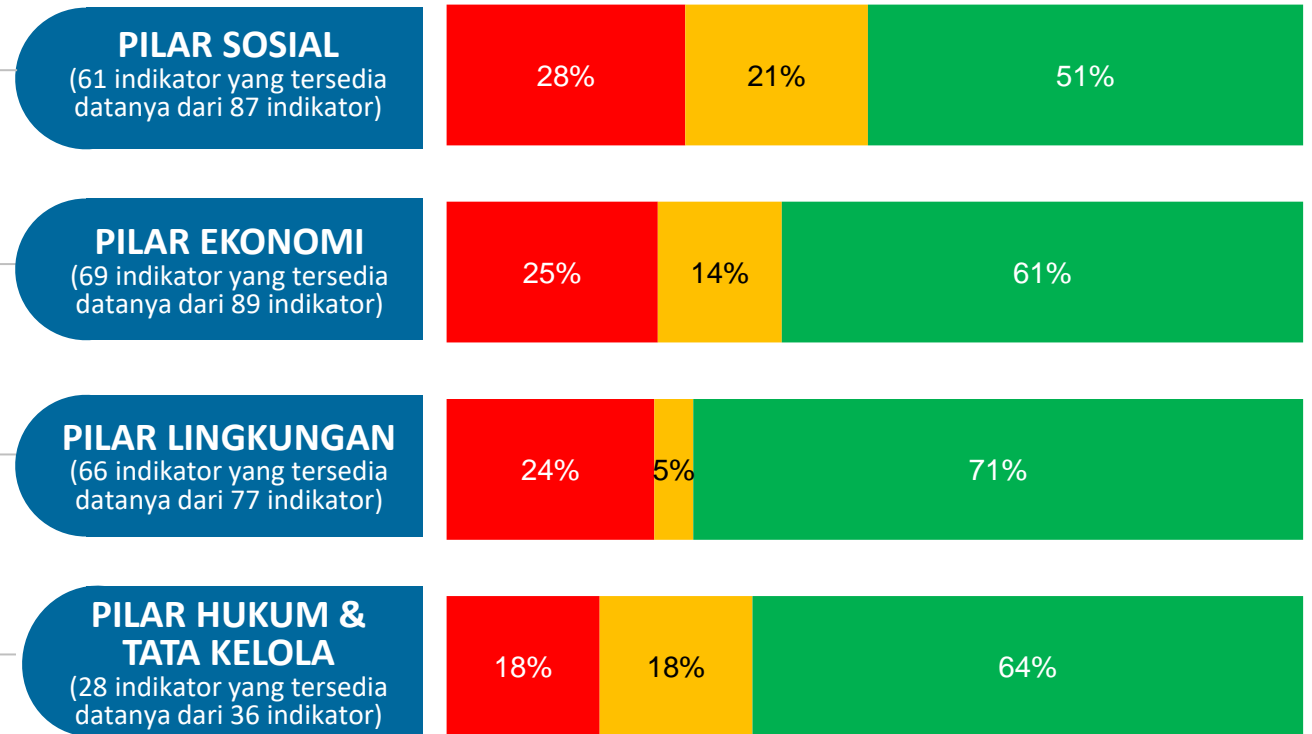


Keterangan:

■ Tercapai

■ Perlu perhatian khusus

■ Akan tercapai/membaik



Sumber: Laporan Pelaksanaan Pencapaian SDGs 2023 (Kementerian PPN/Bappenas)

Keterangan: terdapat 2 indikator yang capaiannya tidak dapat diberikan notifikasi (5.a.2* dan 11.3.1.(a)) karena data baru tersedia 1 tahun dan targetnya PM

- Dari 224 indikator yang dievaluasi, sebagian besar (**62% atau 138 indikator**) telah **tercapai**.
- Kemajuan yang cukup baik dapat dilihat pada pilar lingkungan, hukum tata kelola, dan ekonomi

Masih ada **24% atau 55 indikator** yang memerlukan **perhatian khusus** dan percepatan agar kembali *on-track*.

63 indikator datanya tidak/belum tersedia pada tahun 2022 sehingga perlu penguatan upaya penyediaan data.



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

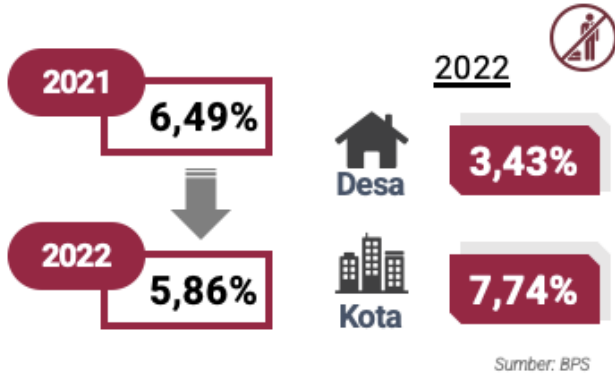


Highlight Capaian SDGs Tahun 2022

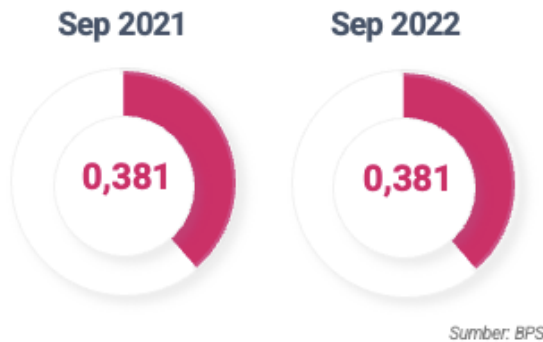
Pilar Pembangunan Ekonomi

Tercapai

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

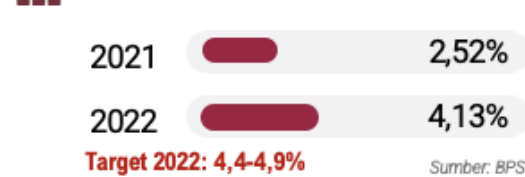


Rasio Gini



Akan Tercapai/Membaik

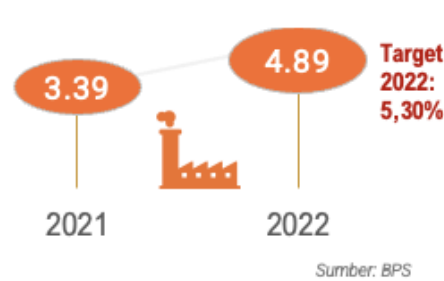
Laju pertumbuhan PDB per kapita (%)



Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit

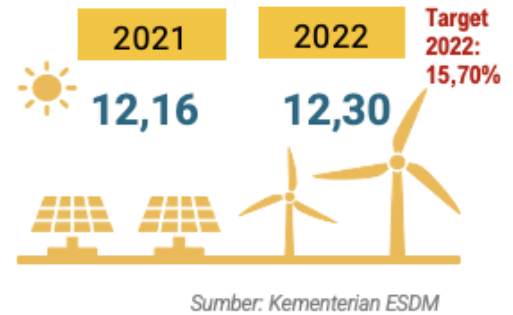


Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (%)

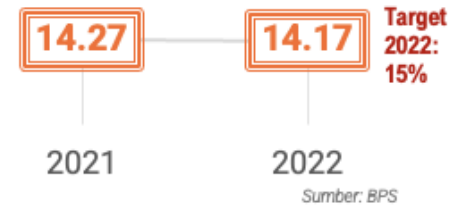


Perlu Perhatian Khusus

Bauran Energi Terbarukan (%)



Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur



Persentase pengguna internet



Dari 69 indikator yang dievaluasi pada Pilar Pembangunan Ekonomi



- **42 indikator** telah mencapai target yang ditetapkan;
- **10 indikator** progresnya membaik/akan tercapai; dan
- **17 indikator** perlu perhatian khusus dan akselerasi.



SDGs SEBAGAI AGENDA BERSAMA

SDGs menjadi **common framework** para pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.



PRINSIP KEMITRAAN DALAM TPB/SDGs

Membangun Kepercayaan, Saling Menghormati Dan Peduli

Kemitraan Yang Setara

Partisipasi Yang Aktif

Akuntabel/Terbuka

Saling Menguntungkan

1. Pemerintah dan Parlemen



- Penetapan Indikator setiap Target/Sasaran
- Pengembangan Kebijakan, Regulasi, & Penyelarasan Program /Kegiatan
- Penyiapan Data & Informasi yg Digunakan
- Sosialisasi/Diseminasi, Monev & Pelaporan
- Pendanaan

2. Filantropi dan Pelaku Usaha



- Advokasi kepada Pelaku Usaha
- Fasilitasi Program/Kegiatan kepada Pelaku Usaha
- Peningkatan Kapasitas
- Dukungan Pendanaan

3. Akademisi dan Pakar



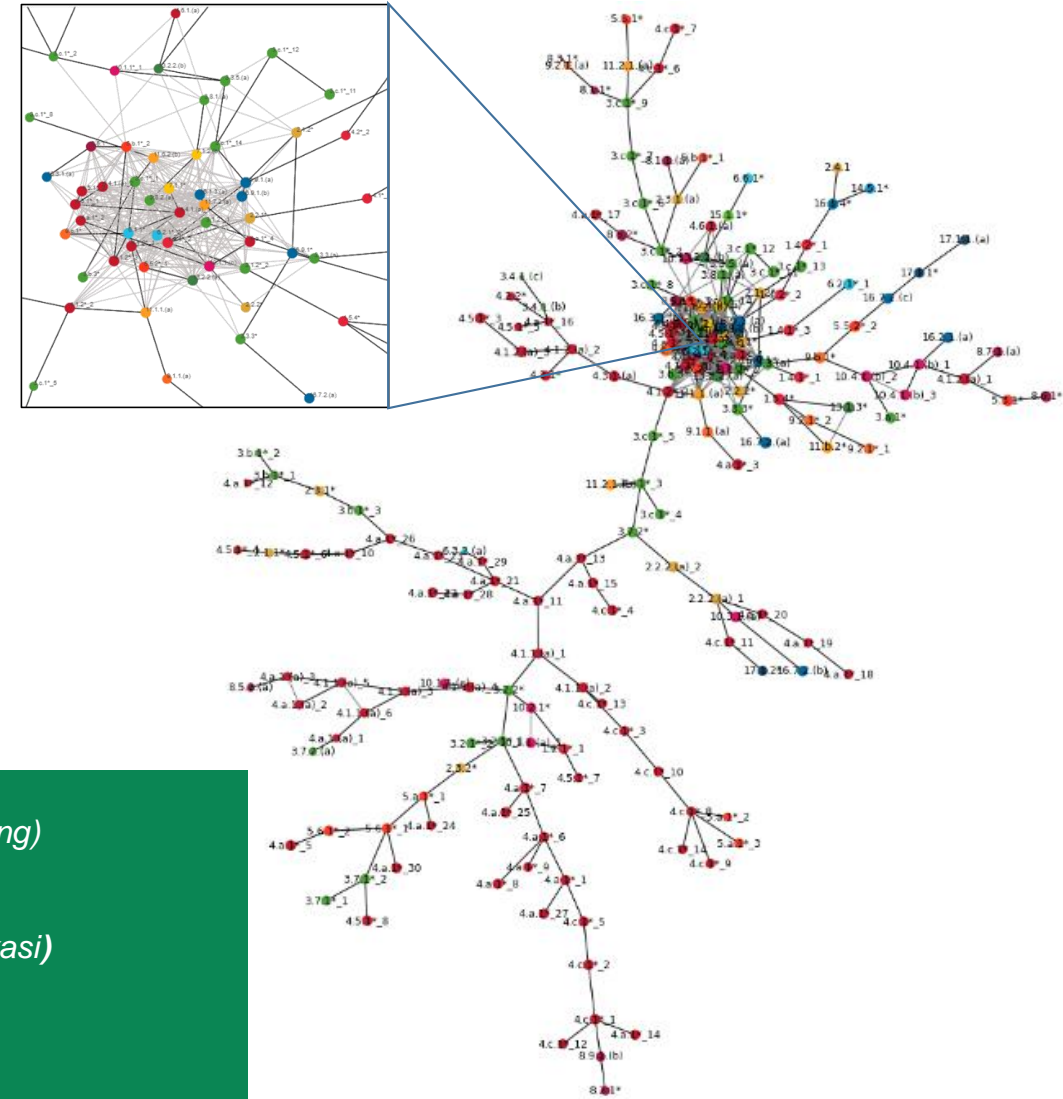
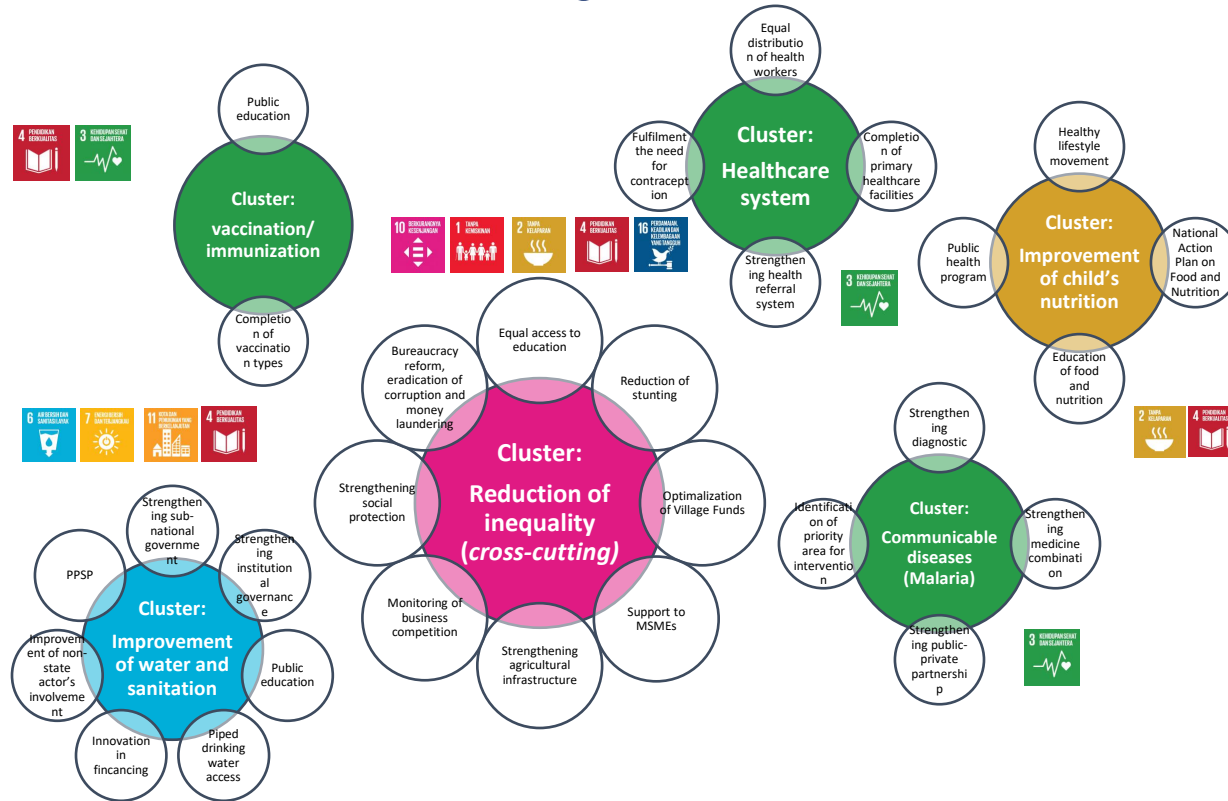
- Peningkatan Kapasitas dan Inovasi Data
- Pemantauan dan Evaluasi
- Policy Research*
- Pengembangan SDGs Center (saat ini ada di 21 perguruan tinggi)

4. Organisasi Masyarakat dan Media



- Diseminasi dan Advokasi kepada Masyarakat
- Fasilitasi Program/Kegiatan di Lapangan
- Membangun pemahaman publik
- Monitoring* Pelaksanaan

Analisis SDGs Interlinkages



Indikator dengan nilai keterhubungan tinggi umumnya terkait dengan pelayanan dasar:

1. Kesehatan (fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, jaminan kesehatan nasional), Pangan (stunting)
2. Hukum (akta kelahiran dan keamanan)
3. Air dan sanitasi layak
4. Pendidikan (penyelesaian pendidikan, infrastruktur sekolah dan teknologi informasi dan komunikasi)
5. Ketimpangan (desa tertinggal)
6. Energi (kelistrikan)
7. hunian layak, dan lingkungan (kualitas udara, penurunan emisi)

Indikator-indikator ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan indikator-indikator lainnya dan memiliki potensi untuk memberikan dampak yang luas. Temuan ini konsisten dengan temuan yang diungkapkan oleh UNESCAP (2016).

KERANGKA RENCANA AKSI SDGs

Renaksi SDGs



Aksi Pemerintah

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)		Realisasi Semester (4)				Realisasi Anggaran Tahunan Berjalan (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2018	2019	2018		2019				
PROGRAM PEMERINTAH										
INDIKATOR 1										
PROGRAM 1										
Kegiatan 1:										
1.1. Indikator Kegiatan										
1.2. Indikator Kegiatan										
1.3. Indikator Kegiatan										
2.1. Indikator Kegiatan										
2.2. Indikator Kegiatan										

Aksi Pemerintah Daerah

Nama Tujuan/Goal TPB/SDGs										
Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)		Realisasi Semester (4)				Realisasi Anggaran Tahunan Berjalan (Rp. juta) (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2020	2021	2020		2021				
PROGRAM PEMERINTAH										
Tipe dan nama indikator TPB/SDGs (8) :										
Tipe dan nama Program (9):										
Kegiatan (10)	Nama Kegiatan (11):									
	1.1. Sub-Kegiatan (12)									
	1.2. Sub-Kegiatan (13)									
	2.1. Sub-Kegiatan (14)									
	2.2. Sub-Kegiatan (15)									

Nama Tujuan (1)							
Nama Target (2)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (9)	Status (10)

Target & Indikator SDGs



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)		Realisasi Semester (4)				Realisasi Anggaran Tahun Berjalan (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Lembaga Pelaksana (8)
		2018	2019	2018		2019					
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
INDIKATOR TPB 1:											
PROGRAM 1 :											
Kegiatan 1:											
Indikator Kegiatan:											
Indikator Kegiatan:											
Indikator Kegiatan:											
Indikator Kegiatan:											

Aksi Non-Pemerintah

Aksi Pelaku Usaha

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Indikator SDGs		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Evaluasi target		
Kode Kegiatan Berkelanjutan	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama indikator SDGs	No. urut	Keg./proyek/prog.	Ind. capaian	Satuan	Waktu (thn)	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

- Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan
- Aspek Ekonomi
- Aspek Lingkungan Hidup
- Aspek Sosial:
 - Internal
 - Eksternal

Metadate





TERIMA KASIH



Sekretariat Koordinasi Nasional SDGs, Bappenas

Website : <http://sdgs.bappenas.go.id/>
Instagram : @sdgs_indonesia
Facebook : SDGsIndonesia
Twitter : @SDGs_Indonesia
Email : sekretariat.sdgs@bappenas.go.id



Strategi Menuju SDGs 2030



Beberapa **kebijakan** diperlukan untuk menghadapi tantangan pada setiap upaya pencapaian target SDGs, diantaranya adalah:

- Evaluasi program-program intervensi pemerintah,
- Investasi pada pembangunan manusia,
- Pengambilan kebijakan yang strategis,
- Penguatan kolaborasi antar pihak, dan
- Peningkatan akses pada layanan dasar.



Pengoptimalan mobilisasi **pembiayaan publik dan swasta** untuk SDGs dilakukan melalui:

- Penyelarasan aliran pembiayaan publik dan swasta,
- Pengoptimalan kapasitas keuangan publik, dan
- Perumusan pembagian peran yang tepat antara lembaga publik dan swasta.



Koordinasi lintas K/L dan peningkatan **kapasitas Pemda** dalam pelaksanaan TPB/SDGs



Kerja sama dan ko-kreasi antara pemerintah dan aktor nonpemerintah di tingkat nasional dan daerah



Penguatan ketersediaan data TPB/SDGs, baik data statistik sektoral (K/L) dan data statistik dasar (BPS)



Isu Pada Pilar Pembangunan SDGs

SOSIAL



Penghapusan kemiskinan, pemberian perlindungan sosial, akses layanan dasar



Pemenuhan pangan (pertanian & peternakan) dan perbaikan gizi



Kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, keluarga berencana, pemenuhan tenaga kesehatan



Akses dan kualitas pendidikan, keterampilan, fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik



Kesempatan kerja, kekerasan, perkawinan anak

EKONOMI



Penyediaan dan akses listrik, gas, energi terbarukan



Pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengangguran, pariwisata, UMKM



Penguatan infrastruktur, transportasi, industri, riset ilmiah, inovasi



Pembangunan daerah, desa, pemberian jaminan ketenagakerjaan



Akses teknologi dan internet, kerjasama pembangunan, penyediaan data

LINGKUNGAN



Penyediaan dan kualitas air minum, sanitasi, air, sumber daya air



Akses rumah/hunian tempat tinggal layak, akses transportasi, warisan budaya, kualitas udara, ruang terbuka publik



Pengelolaan *food loss and waste*, sampah, limbah B3, produk ramah lingkungan



Mitigasi Bencana alam, perubahan iklim, emisi GRK, pendidikan lingkungan



Pencegahan pencemaran laut, illegal fishing, upaya konservasi perairan



Perlindungan keanekaragaman hayati, Kawasan konservasi, spesies terancam punah

HUKUM DAN TATA KELOLA



Penghapusan kekerasan, kejahatan, konflik, eksploitasi, perdagangan manusia, korupsi, penguatan kelembagaan, perlindungan hak asasi manusia

